

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan prososial berawal kemunculannya dari terjadinya kontak sosial, tindakan prososial diambil dan dilakukan perencanaan dengan sebab membantu orang tidak melihat adanya motif-motif penolong. Kepentingan sendiri merupakan motivasi dari tindakan prososial dengan tidak mengharapkan imbalan atau apapun untuk dirinya. Pengabdian dan pengorbanan dari yang melakukan dan bersifat *voluunter* atau kesukarelaan yang akan menguntungkan orang lain ketimbang *profit taking* baik secara sosial maupun materi.

Pada dasarnya dalam tindakan prososial empati kelihatannya memiliki kaitan erat dengan perilaku prososial perseorangan. Kemampuan perseorangan dan empati dimunculkan dalam mengungkapkan emosinya, jadi seseorang dapat ditakar empatinya melalui gugusan epistemologi emosionalnya, ekspresi emosional, dan kapabilitas individu dalam meletakkan peran dengan orang lain. Secara substantif, empati dibatasi pada perseorangan dengan bagaimana dia mengimplementasikan gagasan prososialnya yang dia punya ke dalam tindakannya atau tidak. (Robert dan Strayer, 1996:2)

Hurlock (1999:118) mengungkapkan mengenai empati ialah kapabilitas individu dalam memahami emosi dan *feeling* yang lain dan kapabilitas mengilustrasikan diri di lokus orang lain. Empati seseorang akan mampu menjadi motor perasaan dan tingkah laku dalam memberi bantuan

terhadap orang lain terutama masyarakat miskin yang mendapatkan kasus hukum.

Terdapat faktor kepribadian yang menjadi basis perilaku prososial yang terbagi dalam dua faktor, yaitu kepribadian dan keadaan. Ciri-ciri personal yang berpengaruh terhadap perilaku prososial yakni terdapat emosi yang matang. Seseorang yang memiliki kematangan emosi, ia memiliki kemampuan berperilaku prososial dengan bagus. Chaplin (2006:53) membuat definisi perilaku sebagai seseorang yang mengalami segala hal yang mencakup respon yang dilihat. Watson (2007: 272) menggarisbawahi prososial merupakan perilaku yang mempunyai kontribusi signifikan untuk individu lain, perilaku membantu secara penuh didorong sesuatu yang penting dengan tanpa pamrih. Kartono (2003:180) menyebutkan tindakan prososial merupakan sebuah tindakan sosial yang mengambil *profit* dalam bentuk yang dicirikan bagian-bagian kerjasama, kebersamaan, kooperatif, dan altruisme. Kontribusi yang ditimbulkan dari perilaku prososial sejauhmana seseorang perbuatannya terkait interaksi sosial. Sears (2003:61) menegaskan secara substantif setiap orang tidaklah hanya ciptaan yang satu *ansich* yang dapat hidup mandiri, akan tetapi sebagai kreasi sosial selalu menjadi tergantung pada orang lain, seseorang tidak bisa memperoleh kenikmatan hidup yang bahagia dan senang tanpa *social milieu*. individu disebutkan bertingkah laku prososial bila seseorang tersebut membantu orang lain dengan pengabaian motivasi subjek, perilaku tersebut muncul disebabkan kesusahan yang diderita individu lain yang mencakup bertukar bantuan, saling menghibur, penyelamatan, pengorbanan, kemurahan

hati, dan saling membagi.

Pada negara hukum (*rechtsstaat*), Negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) tiap-tiap individu. Negara mengakui hak individu tersebut *hidden* pada kedudukan yang setara di depan hukum untuk semua individu. Persisnya bahwa suatu *rechtsstaat* warga negara mesti sama perlakuannya di depan hukum (*equality before the law*). Kesetaraan wajib memiliki keseimbangan untuk sama diperlakukan (*equal treatment*). Tidak deskriminatifnya supremasi hukum lewat institusi pengadilan. Dalam pengertian setiap individu, baik memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemampuan dalam segi material, punya hak mendapat pembelaan hukum di depan institusi hukum. Dengan demikian, karakter pendampingan gratis pada sengketa pidana dan perdata dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi dari tatanan hukum dan humanitas bukan dipandang pada sudut degradasi martabat atau harga diri individu yang bertujuan hanya untuk meringankan beban (hukum) masyarakat miskin.

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama orang miskin agar yang berkaitan memperoleh keadilan. Garansi hak tersebut disebutkan pada skala legal nasional dan internasional dalam dimensi mengimplementasikan hak-hak dasar di mana sudah diratifikasi. Mendapatkan pendampingan pengacara maupun konsultan hukum (*access to legal counsel*) merupakan HAM tiap-tiap individu dan salah satu cara untuk diperlakukan secara adil (*access to justice*) bagi seluruh warga (*justice for all*). Hak seseorang tidak boleh diindahkan dalam suatu negara hukum dalam mendapatkan

pendampingan pengacara, konsultan maupun advokat dengan tidak memandang latar belakangnya, misalnya berlatar-belakang etnis, agama, serta strata sosio-ekonomi.

Program pemberian bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin, sudah diberlakukan dari tahun 1980 hingga kini. Pada fase waktu tersebut, terdapat hal yang mengindikasikan di mana sangat dibutuhkan pemberian bankum untuk masyarakat miskin, kemudian juga harapan terdapatnya peningkatan implementasi bankum beberapa tahun. Sasaran *policy* dari kegiatan bankum bagi masyarakat miskin, bukan hanya memberikan pemberdayaan eksistensi dan similaritas hukum untuk semua kalangan warga, program ini juga memiliki tujuan membentuk literasi maupun loyalitas *legal* warga, yakni memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan negara sebagai upaya memberikan pembelaan untuk *legal certainty*.

Sebagai upaya desiminasi pengalokasian biaya bankum untuk warga miskin, permulaan implementasi tepatnya tahun 1980/1981 hingga 1993/1994 terbatas lewat pengadilan negeri pendistribusian biaya bankum, dilanjutkan dari tahun 1994/1995 sampai sekarang, distribusi biaya bantuan hukum meski melalui pengadilan negeri tetapi diserap melalui LBH yang memenuhi syarat di area hukum pengadilan negeri. Jadi, biaya bankum bagi warga miskin bisa didistribusikan melalui (1) biaya bankum lewat pengadilan negeri; maupun (2) biaya bankum difasilitasi melalui LBH.

Pada diktum undang-undang yang kini diberlakukan, bantuan hukum bagi orang miskin yang sedang mengusahakan untuk mendapatkan keadilan

diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. UU No. 49 Tahun 2009 mengenai Amandemen Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jis*. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Amandemen Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam tinjauan perundang-undangan, yang telah dinyatakan pada UUD 1945 pasal 1 ayat (3), Negara Republik Indonesia adalah *rechstaat*, bukan *maachtstaat*. Konstitusi mengamanahkan untuk mendirikan negara yang menjunjung tinggi keadilan. Walaupun begitu, Rahardjo, pada diseminasi tulisan di buku panduan *Law Conference* (2012) menegaskan, untuk mendirikan *rechstaat* itu tidak hanya untuk menempel slogan, akan tetapi pekerjaan besar di mana menghabiskan energi. Sewindu terakhir, Indonesia sudah maksimal mengusahakan pembaruan menuju negara hukum. Indonesia telah melakukan Amandemen perundang-undangan, *legal drafting*, penyediaan institusi baru, revitalisasi kelembagaan dan aparaturnya penegak hukum. Meskipun demikian, kesuksesan membangun negara hukum bukan hanya ditakar dari kapabilitas *legal drafting* dan mengkreasi atau mereformulasi kelembagaan hukum. Lebih jauh, kesuksesan *rechstaat* diukur pada pelaksanaan maupun supremasi hukum sehingga dapat menegakkan kata adil bagi semua khususnya kelompok rentan, perempuan, kelompok miskin, kelompok adat dan kaum tertindas.

Peneliti melakukan kajian ini berawal dari keprihatinan ketika menemukan fenomena praktik supremasi hukum yang terjadi di tengah masyarakat, terutama golongan rentan pada orang-orang tidak mampu seringkali

memunculkan ketidakberdayaan. Kelompok orang-orang tidak mampu sangat rentan dengan perlakuan ketidakadilan hukum kelompok sosial di tengah kehidupan masyarakat. Proses supremasi hukum diyakini melahirkan ketidakadilan hukum dan intoleransi. Perlakuan tidak adil hukum ini bersumber dari operasional hukum dalam suatu sistemnya.

Kajian yang ditulis Sholahudin (2011:25) mengenai supremasi hukum orang-orang tidak mampu pada perkara pidana pencurian petani semangka yang tidak mampu; Kholil dan Bashir di Kota Kediri, mengindikasikan pada supremasi hukum oknum aparat dalam pemahaman kasus hukum semata-mata tekstual “*rigid*” sesuai dengan undang-undang saja, *legalistic-positivistik*, tidak ada usaha untuk melakukan pemahaman perkara itu dalam perspektif sosiologis. Bagi Sukadi (2011), niscayanya hukum bukan saja mengistimewakan *formal procedural* senantiasa mendahulukan *legal certainty*. Tetapi juga mesti dapat memandang secara komprehensif dalam berbagai problem yang timbul di dalam kehidupan. Dalam arti bahwa hukum bukan saja terbatas dalam perspektif sistemik aturan yang *rigid (exclusive)* melainkan hukum dalam tinjauan tatanan nilai yang fleksibel (*inclusive*). Jadi, bukan hanya adanya *legal certainty*, akan tetapi keadilan yang bernilai di masyarakat.

Kajian yang dilakukan Tanuredjo (2010), memberi indikasi hukum bisa diputarbalikkan serta dibuat main-main, apalagi ketika menimpa rakyat miskin. Jamak kisah beberapa kasus ketika masuk dalam siklus hukum, orang yang lemah sekedar memburu legal-formal, bukan substantif. Individu yang lemah niscayanya *vis-a-vis* dengan penegak hukum yang profesional menyebut pasal

serta memiliki sifat yang memanfaatkan mereka yang belum mengenal hukum. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, dalam karyanya “Nenek Minah tak Curi Coklet”, (2010), keadilan hukum ialah implementasi hukum secara nasional yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang berbasis *local wisdom* yang menjadi *living law* di lingkungan mereka. Namun dalam ranah yang lain, tindakan hukum yang terjadi pada masyarakat miskin di Palangka Raya justru mendapatkan perhatian serius bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Ada beberapa OBH yang terdaftar menjadi relawan hukum dalam beberapa kasus yang dalam kurun waktu 3 tahun ini didampinginya, antara lain kasus ITE, kasus pencurian, kasus narkoba (Pidana), serta kasus perceraian, itsbat nikah, dispensasi nikah (perdata). Adapun beberapa OBH yang turut aktif dalam melakukan pendampingan antara lain, Perkumpulan Eka Hapakat Sampit Kalimantan Tengah, Perkumpulan Konsultasi Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Hambaring Hurung Sampit, Perkumpulan Sahabat Hukum, Perkumpulan Bantuan Hukum Barito Terbit, Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Palangka Raya, Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa.

Pada gambaran problem di atas maka dilakukan studi ilmiah mengenai tindakan prososial aktivis hukum yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum di Kota Palangka Raya. Studi tersebut berbasis pandangan bahwa perilaku prososial yang diartikan sebagai suatu kepedulian terhadap sesama apapun motifnya. Bagi Baron & Byrne (2005) menegaskan bahwa perilaku prososial berupa sebuah tindakan menolong yang memberikan keuntungan bagi

orang lain walaupun tidak harus menguntungkan secara langsung pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan barangkali bahkan mengakibatkan suatu resiko bagi individu yang menolong. Gerungan (2000) menyebutkan bahwa perilaku prososial meliputi perilaku yang memberi keuntungan kepada orang lain di mana memiliki sebab akibat sosial yang positif dengan begitu akan menambah kebaikan lahir maupun batin. Abraham dan Shanley (1992) menyatakan secara jelas bahwa kontribusi sosial dan orang lain pada situasi darurat yang lebih mungkin menjadi sebab keputusan diambil untuk menolong.

Mitra kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yakni Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya melaksanakan kegiatan Sosialisasi berupa Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum Gratis kepada Masyarakat Miskin atau tidak mampu di Balai Basara Kelurahan Habaring Hurung Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Palangka Raya Senin (14/08). Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah H. Ahmadi dalam keterangannya mengatakan penyuluhan tentang bantuan hukum gratis ini terselenggara atas kerjasama Kantor Wilayah dengan OBH Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya. Berikut salah satu dokumentasi aktivitas Sahabat Hukum.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum oleh OBH Perkumpulan Sahabat Hukum

Sementara itu Direktur OBH Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya Fachri Ahyani dalam paparannya mengatakan bahwa sosialisasi bantuan hukum gratis ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui ada organisasi yang siap membantu terhadap masyarakat yang terkena kasus/masalah hukum secara gratis. Akan tetapi menurut Fachri bantuan hukum secara gratis kita berikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin atau tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis maka salah satu persyaratan yakni adanya surat keterangan dari RT/Kepala Desa setempat. Fachri juga menambahkan saat ini pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa bantuan hukum gratis melalui program dari Kementerian Hukum dan HAM, karena berdasarkan undang-undang setiap warga negara indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama/tidak dibeda-bedakan.

B. Rumusan Masalah

Tindakan prososial merupakan tindakan menolong atau memberikan bantuan yang ditujukan untuk menguntungkan orang lain (tanpa mengharapkan imbalan) atau menguntungkan diri sendiri, tanpa ada unsur paksaan, termasuk dalam menolong kepada masyarakat miskin di Kota Palangka Raya oleh OBH.

Program pemberian bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin, sudah diberlakukan dari tahun 1980 hingga kini. Pada fase waktu tersebut, terdapat hal yang mengindikasikan di mana sangat dibutuhkan pemberian bankum untuk masyarakat miskin, kemudian juga harapan terdapatnya peningkatan implementasi bankum beberapa tahun. Sasaran *policy* dari kegiatan bankum bagi masyarakat miskin, bukan hanya memberikan pemberdayaan eksistensi dan similaritas hukum untuk semua kalangan warga, program ini juga memiliki tujuan membentuk literasi maupun loyalitas *legal* warga, yakni memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan negara sebagai upaya memberikan pembelaan untuk *legal certainty*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan prososial aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) di Kota Palangka Raya?
2. Apa makna tindakan prososial aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) dalam memberikan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka dapat di rumuskan tujuan penelitian ini. Dalam rumusan secara umum makan tujuannya adalah menginteprestasikan makna tindakan para aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) dalam melakukan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Palangka Raya dan secara spesifik tujuannya sebagai berikut:

1. Memahami tindakan prososial aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) di Kota Palangka Raya?
2. Memahami makna tindakan prososial aktivis organisasi bantuan hukum (OBH) dalam memberikan pendampingan hukum di Kota Palangka Raya?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberiksan manfaat di kemudian hari terutama yang berupa:

1. Manfaat Teoritis: Menemukan teori sosiologi khususnya tentang makna tindakan prososial bagi aktivis hukum.
2. Manfaat Praktis: Apabila telah diketemukan makna tindakan proosial sesuai dengan pemahaman para aktivis bantuan hukum, maka akan lebih mudah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberika kebijakan yang adil. Sehingga akan terjadi titik *equalibrium* antara *top down planning* dengan *bottom up planning* dalam penegakan hukum di Indonesia.